



## **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR: 4 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

### **KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Ketentuan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaha Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang mencakup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

**BAB II**  
**ANGGARAN KAS**

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan Anggaran Kas SKPD.
- (2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersama dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (4) Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 Sebagaimana Daftar Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Pelaksana Anggaran Kas yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Surat Penyedia Dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal: 26-1-2017



Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal: 26-1-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	JOL.	KET.
KAS.SUR.BAG.			
KABAG.			

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 26 JANUARI 2017**  
**TENTANG : KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS PER-TRIWULAN			
			I	II	III	IV
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>271,358,812,047.00</b>	<b>67,839,703,012</b>	<b>67,839,703,012</b>	<b>67,839,703,012</b>	<b>67,839,703,012</b>
1.1.1	Pajak Daerah	70,600,000,000.00	17,650,000,000	17,650,000,000	17,650,000,000	17,650,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	50,487,401,156.00	12,621,850,289	12,621,850,289	12,621,850,289	12,621,850,289
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,256,346,708.00	814,086,677	814,086,677	814,086,677	814,086,677
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	147,015,064,183.00	36,753,766,046	36,753,766,046	36,753,766,046	36,753,766,046
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,725,624,298,000.00</b>	<b>431,406,074,500</b>	<b>431,406,074,500</b>	<b>431,406,074,500</b>	<b>431,406,074,500</b>
1.2.1	Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak	63,081,963,000.00	15,770,490,750	15,770,490,750	15,770,490,750	15,770,490,750
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,218,601,913,000.00	304,650,478,250	304,650,478,250	304,650,478,250	304,650,478,250
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	443,940,422,000.00	110,985,105,500	110,985,105,500	110,985,105,500	110,985,105,500
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>487,709,462,599.00</b>	<b>121,927,365,650</b>	<b>121,927,365,650</b>	<b>121,927,365,650</b>	<b>121,927,365,650</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2,484,692,572,646.00</b>	<b>621,173,143,162</b>	<b>621,173,143,162</b>	<b>621,173,143,162</b>	<b>621,173,143,162</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35,949,262,296.00</b>	<b>8,987,315,574</b>	<b>8,987,315,574</b>	<b>8,987,315,574</b>	<b>8,987,315,574</b>
3.1.1	Saldo Awal Kas/(SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	35,949,262,296.00	8,987,315,574	8,987,315,574	8,987,315,574	8,987,315,574
	<b>Jumlah Pendapatan dan Pembayaan Penertmaan</b>	<b>2,520,641,834,942.00</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>
	<b>Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia untuk Pengeluaran</b>	<b>2,520,641,834,942.00</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN BELANJA DAERAH</b>	<b>2,515,356,977,263.00</b>	<b>628,839,244,316</b>	<b>628,839,244,316</b>	<b>628,839,244,316</b>	<b>628,839,244,316</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,692,834,009,702.00	423,208,502,426	423,208,502,426	423,208,502,426	423,208,502,426
2.2	Belanja Langsung	822,522,967,561.00	205,630,741,890	205,630,741,890	205,630,741,890	205,630,741,890
	<b>Jumlah Alokasi Belanja PerTriwulan</b>	<b>5,284,857,679.00</b>	<b>1,321,214,420</b>	<b>1,321,214,420</b>	<b>1,321,214,420</b>	<b>1,321,214,420</b>
3.3	Pengeluaran Pembayaan	5,284,857,679.00	1,321,214,420	1,321,214,420	1,321,214,420	1,321,214,420
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembayaan Per-Triwulan</b>	<b>5,284,857,679.00</b>	<b>1,321,214,420</b>	<b>1,321,214,420</b>	<b>1,321,214,420</b>	<b>1,321,214,420</b>
	<b>Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembayaan</b>	<b>2,520,641,834,942.00</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>	<b>630,160,458,736</b>
	<b>Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja dan Pembayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

